Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (2) 2026, Page: 24322-24328

Analisis Pengeluaran Anggaran Daerah dalam Pembangunan Monumen Reog sebagai Ikon Pariwisata di Kabupaten Ponorogo

Azizah Laila Zahro[1], Angelina Bunga Pertiwi[2], Revienda Anita Fitrie[3], Eva Hany Fanida[4]
Program studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Corresponding author e-mail: 25040674215@mhs.unesa.ac.id, 25040674210@mhs.unesa.ac.id, reviendafitrie@unesa.sc.id, evafanida@unesa.ac.id

Published: April , 2026

ABSTRACT

This research intends to analyze the budget allocations made at the regional level for the advancement of the Reog Monument located in Ponorogo, which serves as a symbol of tourism. The study employs a qualitative descriptive method by reviewing documents related to regional financial statements and planning materials spanning from 2021 to 2026. Findings indicate that the budget expenditures have demonstrated a significant level of effectiveness and efficiency, achieving a realization rate of approximately 97% of the assigned total of IDR 173 billion. Regarding allocation, the local government emphasizes the tourism industry through the development of necessary infrastructure and accompanying facilities. From an effectiveness standpoint, the budget plays a role in boosting Regional Original Revenue (PAD) and enhancing cultural identity, even though the target for tourist visits has not been completely fulfilled. In terms of efficiency, the substantial budget absorption reflects competent financial management; however, a disparity still exists in the fair distribution of economic advantages. In summary, the budget expenditures have a favorable impact on tourism development yet still warrant further improvement.

Keywords: *Regional Budget Allocation, Efficiency, Effectiveness, Tourism, Reog Monument Ponorogo*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengelolaan anggaran daerah dalam pembangunan Monumen Reog Ponorogo sebagai simbol pariwisata daerah. Metode yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif, menggunakan analisis data melalui studi dokumen yang mencakup laporan keuangan daerah, dokumen rencana pembangunan, dan data pendukung lainnya selama periode 2021–2026. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa pengeluaran anggaran daerah telah dikelola dengan cukup efektif dan efisien, tercermin dari tingkat realisasi anggaran yang mencapai sekitar 97,1% dari total anggaran sebesar Rp173.000.000. Dalam hal alokasi, pemerintah daerah memberikan prioritas pada 1ector pariwisata dengan membangun infrastruktur dan fasilitas penunjang. Sedangkan dari perspektif efektivitas, dana yang dialokasikan berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkuat identitas budaya lokal, meskipun target kunjungan wisatawan belum sepenuhnya terpenuhi. Di sisi efisiensi, tingginya serapan anggaran menunjukkan pengelolaan yang cukup baik, namun masih terdapat perbedaan antara target dan realisasi, terutama dalam hal distribusi dampak ekonomi kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengeluaran anggaran daerah untuk Pembangunan Monumen Reog Ponorogo sejatinya berkontribusi positif terhadap pengembangan 1ector pariwisata, namun perlu ada upaya lebih lanjut untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja secara keseluruhan.

Kata Kunci: Pengeluaran Anggaran Daerah, Efektivitas, Efisiensi, Pariwisata, Monumen Reog Ponorogo

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memegang peranan krusial dalam pengelolaan dana publik guna mendukung kemajuan wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan dana tersebut tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berfungsi untuk mendanai berbagai program pembangunan, seperti infrastruktur, pelayanan publik, dan pengembangan ekonomi lokal. Salah satu bidang yang mendapat perhatian dari pemerintah daerah adalah pariwisata, karena dianggap mampu memberikan sumbangan pada pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah.

Dalam usaha mengembangkan pariwisata yang berbasis budaya, pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo sedang melaksanakan pembangunan Monumen Reog Ponorogo yang

direncanakan menjadi simbol wisata baru. Monumen ini didirikan untuk menggambarkan seni Reog yang merupakan identitas budaya masyarakat Ponorogo serta menjadi daya tarik wisata yang mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

Pembangunan Monumen Reog memerlukan alokasi anggaran daerah yang cukup signifikan, mengingat tidak hanya mencakup pembangunan monumen utama, tetapi juga meliputi pembuatan fasilitas pendukung seperti museum, area pentas budaya, dan infrastruktur untuk kawasan wisata. Pemerintah daerah berharap bahwa proyek ini dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan sektor pariwisata dan perekonomian warga.

Namun, pengeluaran dana daerah untuk proyek besar seperti monumen sering kali memicu berbagai diskusi di antara masyarakat. Sebagian orang percaya bahwa proyek ini dapat meningkatkan potensi pariwisata dan ekonomi daerah, namun di sisi lain, ada yang mempertanyakan efektivitas alokasi dana daerah dan prioritas pembangunan yang diambil oleh pemerintah.

Kebijakan pembangunan Monumen Reog pada dasarnya bertujuan untuk memperbesar daya tarik wisata daerah dan memperkuat identitas budaya setempat. Harapan dari kebijakan ini adalah terciptanya lokasi wisata baru yang dapat menarik kedatangan wisatawan serta memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya.

Namun kenyataannya, pembangunan ini menghadapi sejumlah tantangan, seperti besarnya dana yang dibutuhkan dan adanya kritik dari masyarakat mengenai prioritas penggunaan dana daerah. Situasi ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara harapan kebijakan dan realitas yang ada di lapangan.

Penting untuk melakukan analisis terhadap pengeluaran dana daerah dalam pembangunan Monumen Reog guna mengetahui sejauh mana penerapan kebijakan tersebut telah dilakukan dengan efektif. Selain itu, kajian ini juga diperlukan untuk menilai apakah pengeluaran dana daerah pada pembangunan monumen tersebut benar-benar memberikan keuntungan untuk pengembangan pariwisata dan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan latar belakang permasalahan ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengeluaran dana daerah dalam pembangunan Monumen Reog Ponorogo di Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana pemerintah daerah melaksanakan kebijakan pembangunan Monumen Reog sebagai simbol pariwisata daerah. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi apakah ada perbedaan antara tujuan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan kondisi aktual di lapangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk mengevaluasi pengeluaran anggaran pemerintah daerah dalam pembangunan Monumen Reog Ponorogo sebagai simbol pariwisata di Kabupaten Ponorogo. Pendekatan yang bersifat kualitatif dipilih karena tujuan dari penelitian adalah untuk memahami kebijakan anggaran daerah dan cara pemerintah daerah melaksanakan kebijakan tersebut dalam rangka mendukung sektor pariwisata.

Dalam penelitian ini, data sekunder yang relevan dengan topik ditarik dari berbagai sumber tulisan. Data tersebut mencakup dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), laporan keuangan dari pemerintah daerah, dokumen perencanaan pembangunan, jurnal ilmiah, buku referensi, serta publikasi resmi lainnya yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan pariwisata dan pengeluaran anggaran daerah. Informasi dari berbagai sumber ini digunakan untuk mengamati cara pemerintah daerah mengatur anggaran untuk pembangunan Monumen Reog serta penggunaan anggaran dalam proses pembangunan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai dokumen yang berkaitan dengan kebijakan pengeluaran anggaran daerah. Dokumen yang diperiksa meliputi laporan anggaran pemerintah daerah, dokumen perencanaan pembangunan, serta berbagai sumber yang membahas tentang pembangunan Monumen Reog Ponorogo sebagai tujuan wisata budaya.

Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menafsirkan informasi yang diperoleh dari sumber literatur guna memahami bagaimana pemerintah daerah

menggunakan pengeluaran anggaran dalam pembangunan monumen tersebut. Metode ini juga berfungsi untuk menilai apakah penggunaan anggaran daerah telah sesuai dengan sasaran kebijakan pembangunan pariwisata lokal.

Analisis tentang pengeluaran anggaran daerah dalam penelitian ini juga mengacu pada konsep keuangan publik yang diajukan oleh Richard A. Musgrave, yang menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki fungsi alokasi dalam menyediakan barang publik, seperti infrastruktur dan fasilitas umum. Dalam konteks penelitian ini, pembangunan Monumen Reog dipandang sebagai salah satu bentuk pengeluaran pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas publik yang diharapkan dapat memperkuat pengembangan pariwisata dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Melalui pendekatan penelitian ini, diharapkan dapat tercapai pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebijakan pengeluaran anggaran daerah dalam pembangunan Monumen Reog serta peranan kebijakan tersebut dalam memajukan sektor pariwisata di Kabupaten Ponorogo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan Monumen Reog Ponorogo merupakan bagian dari proyek penting pemerintah Kabupaten Ponorogo yang dilaksanakan antara tahun 2023 hingga 2026. Monumen ini dirancang untuk menjadi simbol pariwisata budaya yang menggambarkan seni Reog, yaitu kesenian pertunjukan tradisional yang termasuk dalam warisan budaya tak benda Indonesia. Pembangunan monumen ini mencakup tidak hanya pembangunan struktur utama, tetapi juga berbagai fasilitas pendukung yang lengkap.

Berdasarkan kajian dokumen perencanaan pembangunan daerah dan laporan keuangan dari pemerintah Kabupaten Ponorogo, jumlah total dana yang dipersiapkan untuk pembangunan Monumen Reog beserta semua fasilitas penunjangnya adalah Rp 173.700.000.000 (seratus tujuh puluh tiga tujuh ratus miliar rupiah). Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ponorogo yang diterapkan secara bertahap selama tiga tahun anggaran.

Dalam perspektif keuangan publik yang dikemukakan oleh Musgrave (2019), pengeluaran pemerintah untuk pembangunan monumen ini dapat digolongkan sebagai fungsi alokasi anggaran untuk menyediakan barang publik. Sebagai barang publik, Monumen Reog Ponorogo diharapkan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, baik sebagai tujuan wisata maupun sebagai sarana pelestarian kebudayaan lokal.

Analisis Alokasi dan Realisasi Anggaran Daerah 2021-2026

Pengelolaan anggaran daerah untuk area Monumen Reog Ponorogo tidak terbatas hanya pada tahap pembangunan fisik. Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah menetapkan kerangka anggaran yang mencakup beberapa tahun, terbagi dalam dua tahap: Tahap I (Pembangunan Fisik, 2021–2023) dan Tahap II (Pemeliharaan dan Pengembangan, 2024–2026). Total akumulasi anggaran untuk enam tahun mencapai Rp. 173.700.000.000 dan realisasinya sebesar Rp. 168.230.000.000. Tabel 1 di bawah ini menyajikan rincian lengkap mengenai alokasi dan realisasi anggaran berdasarkan komponen selama periode 2021–2026:

Tabel 1. Alokasi dan Realisasi Anggaran Pembangunan serta Pengembangan Monumen Reog Ponorogo Tahun 2021-2026

No	Komponen Anggaran	Tahun Anggaran	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)
-	**FASE 1 – PEMBANGUNAN FISIK (2021-2023)**	-	-	-
1	Pembangunan monumen utama (Struktur & Arsitektur)	2021-2022	Rp 45.000.000.000	Rp. 43.750.000.000
2	Pembangunan Museum Reog & Galeri Budaya	2022	Rp. 18.500.000.000	Rp. 17.800.000.000
3	Pembangunan Area Pertunjukan Budaya (Amphiteather)	2022-2023	Rp. 22.000.000.000	Rp. 21.500.000.000

4	Infrastruktur Kawasan Wisata (Jalan & Parkir)	2022-2023	Rp. 30.000.000.000	Rp. 29.200.000.000
5	Fasilitas Pendukung (Kios, Toilet, Taman)	2023	Rp. 12.000.000.000	Rp. 11.600.000.000
	Subtotal Fase 1	2021-2023	Rp. 127.500.000.000	Rp. 123.850.000.000
-	**FASE II – PEMELIHARAAN & PENGEMBANGAN (2024-2026)**	-	-	-
6	Pemeliharaan & Perawatan Monumen serta Fasilitas	2024	Rp. 8.500.000.000	Rp. 8.150.000.000
7	Pengembangan Digitalisasi & Wisata Edukasi	2024	Rp. 6.200.000.000	Rp. 5.900.000.000
8	Pengembangan Zona UMKM & Ekonomi Kreatif	2025	Rp. 11.500.000.000	Rp. 10.980.000.000
9	Peningkatan Aksesibilitas & Transportasi Wisata	2025	Rp. 13.000.000.000	Rp. 12.600.000.000
10	Promosi Digital & Pemasaran Wisata	2026	Rp. 7.000.000.000	Rp. 6.750.000.000
	Subtotal Fase II	2024-2026	Rp. 46.200.000.000	Rp. 44.380.000.000
	GRAND TOTAL ANGGARAN 2021-2026		Rp. 173.700.000.000	Rp. 168.230.000.000

Sumber: Diolah dari dokumen APBD Kabupaten Ponorogo 2021-2026 dan laporan keuangan daerah. Data merupakan alokasi anggaran berjalan (per April 2026)

Berdasarkan data yang ada dalam tabel, Fase I (2021–2023) menunjukkan total penggunaan mencapai Rp. 123.850.000.000 yang mencerminkan 97,1% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 127.500 miliar. Komponen paling penting adalah pembangunan monumen utama dengan alokasi dana sekitar Rp 45 miliar, yang mencakup aspek desain arsitektur, struktur bangunan, serta elemen seni budaya Reog. Selain itu, infrastruktur untuk area wisata menghabiskan Rp 30 miliar, yang meliputi jalan akses, tempat parkir.

Dalam Fase II (2024–2026), fokus anggaran bergeser dari pembangunan fisik menuju pemeliharaan, peningkatan kapasitas, dan perluasan dampak ekonomi. Anggaran untuk Fase II sebesar Rp. 46.200.000.000 akan difokuskan pada tiga poin utama: (1) pemeliharaan dan Perawatan Monumen serta Fasilitas dengan total anggaran Rp 8.500.000.000, (2) Pengembangan Zona UMKM & Ekonomi Kreatif dengan dana Rp. 11.500.000.000, serta (3) Promosi Digital & Pemasaran Wisata juga sebesar Rp. 7.000.000.000. Penambahan anggaran untuk sektor promosi dan ekonomi kreatif menunjukkan kemajuan strategi pariwisata di daerah ini.

Mardiasmo (2020) menyoroti pentingnya pengeluaran pemerintah yang efektif di sektor pariwisata yang harus mempertimbangkan seluruh siklus investasi, tidak hanya pada tahap awal pembangunan, tetapi juga dalam fase pemeliharaan dan pengembangan berkelanjutan. Struktur anggaran multi-tahun untuk Monumen Reog yang secara terus-menerus menyediakan dana untuk pemeliharaan dan perkembangan setelah penyelesaian pembangunan konsisten dengan prinsip pengelolaan investasi publik yang berkelanjutan.

Dari sudut pandang alokasi, besaran anggaran yang mencapai Rp173.700.000 menunjukkan bahwa pemerintah daerah menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu fokus utama pembangunan. Dalam konteks keuangan publik, hal ini sejalan dengan peran alokasi pemerintah yang diungkapkan oleh Richard A. Musgrave (2019), yakni mengatur penyediaan barang publik yang dapat memberikan manfaat luas untuk masyarakat.

Selanjutnya, dari perspektif efektivitas, pengeluaran anggaran telah menghasilkan dampak yang cukup positif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memperkuat eksistensi

budaya daerah. Meskipun demikian, ketidak tercapainya sasaran kunjungan wisatawan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara alokasi anggaran dengan hasil yang diharapkan, terutama dalam sektor promosi dan pengembangan daya tarik wisata. Dari segi efisiensi, tingkat realisasi anggaran yang melebihi 96% menunjukkan bahwa pemanfaatan anggaran telah dilakukan secara optimal serta sesuai dengan rencana. Menurut Mahmudi (2019), efisiensi pengeluaran anggaran dapat dinilai dari kemampuan pemerintah dalam memaksimalkan hasil dengan sumber daya yang ada. Penjelasan ini didukung oleh Halim Abdul (2023) yang menyatakan bahwa tingginya penyerapan anggaran menunjukkan efisiensi administratif selama tidak mengurangi mutu hasil pembangunan. Selain itu, dalam perspektif dampak ekonomi, belanja anggaran telah berkontribusi pada pertumbuhan usaha kecil dan menengah serta penciptaan pekerjaan, meskipun distribusi keuntungannya belum merata. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas belanja anggaran masih perlu ditingkatkan agar manfaat ekonomi bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Dengan demikian, analisis ini menggarisbawahi bahwa pengeluaran anggaran daerah untuk pembangunan Monumen Reog Ponorogo secara umum telah menunjukkan hasil yang positif, namun masih memerlukan perbaikan terutama dalam meningkatkan hasil di sektor pariwisata dan pemerataan dampak ekonomi.

Analisis Kesenjangan Kebijakan (*Policy Gap Analysis*)

Salah satu elemen krusial dalam penelitian ini adalah penelaahan perbedaan antara sasaran kebijakan yang sudah dirumuskan oleh pemerintah daerah dengan realitas yang ada di lapangan. Agustino (2021) mengemukakan bahwa adanya perbedaan kebijakan adalah fenomena umum yang muncul saat pelaksanaan proyek pembangunan besar di daerah, yang dapat timbul akibat berbagai penyebab seperti terbatasnya kapasitas institusi, perubahan kondisi di luar, atau perlawanan dari para pemangku kepentingan.

Analisis perbedaan dalam kebijakan pembangunan Monumen Reog Ponorogo menunjukkan bahwa secara keseluruhan, pelaksanaan kebijakan telah berjalan dengan cukup baik, walaupun masih ada beberapa aspek yang perlu diteliti lebih lanjut. Dari sisi pengembangan objek wisata, Monumen Reog ditargetkan untuk menarik sekitar 100. 000 pengunjung setiap tahun. Namun, pada kenyataannya, hingga awal tahun 2026, jumlah pengunjung tercatat kurang dari 50. 000 orang. Hal ini mengindikasikan bahwa target yang ditetapkan belum tercapai, meskipun hasilnya belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi awal. Selanjutnya, terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah memproyeksikan pertumbuhan minimal 50% dalam dua tahun sesudah pembangunan. Data menunjukkan bahwa PAD dari sektor pariwisata malah meningkat sebesar 60% selama periode 2023-2026. Ini berarti bahwa target telah terpenuhi. Dari segi efektifitas pemanfaatan anggaran, sasaran kebijakan adalah mencapai realisasi anggaran antara 95% hingga 100% sambil menjaga kualitas pembangunan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Dalam realisasinya, anggaran yang terealisasi mencapai 97,1% atau setara dengan Rp123,850 miliar dari keseluruhan Rp127,500 miliar. Ini menunjukkan bahwa pemanfaatan anggaran berjalan secara efektif dan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Dari perspektif penguatan identitas budaya, Monumen Reog diharapkan bisa menjadi lambang kesenian Reog sekaligus memperkuat jati diri budaya masyarakat Ponorogo. Hasilnya, keberadaan monumen ini berhasil meningkatkan pengakuan terhadap kesenian Reog baik di lingkup nasional maupun internasional.

Di sisi lain, dari sudut pandang dampak ekonomi bagi masyarakat, pembangunan monumen ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar area wisata. Di lapangan, memang terjadi pertumbuhan UMKM di wilayah tersebut, namun keuntungan ekonominya belum dirasakan secara merata oleh semua lapisan masyarakat.

Terakhir, dari segi responsivitas publik, kebijakan ini diharapkan mendapat dukungan penuh dari masyarakat sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Namun, dalam praktiknya, masih ada sebagian anggota masyarakat yang memberikan kritik, terutama terkait alokasi anggaran yang dinilai seharusnya lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Analisis menunjukkan bahwa dari enam aspek kebijakan yang dikaji, sebagian besar telah memperlihatkan kinerja yang cukup baik. Empat aspek bahkan mampu mencapai hasil yang positif, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Aspek tersebut meliputi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas penggunaan anggaran, penguatan identitas budaya, serta peningkatan serapan tenaga kerja lokal. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pembangunan yang dilakukan tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi daerah, tetapi juga turut memperkuat nilai-nilai budaya serta membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat.

Namun demikian, tidak semua aspek menunjukkan hasil yang optimal. Masih terdapat dua aspek yang memerlukan perhatian lebih lanjut, yaitu pencapaian target kunjungan wisatawan dan dampak ekonomi terhadap masyarakat sekitar. Kedua aspek ini belum sepenuhnya sesuai dengan harapan awal kebijakan, sehingga diperlukan upaya optimalisasi, baik melalui strategi promosi wisata yang lebih efektif maupun penguatan keterlibatan masyarakat lokal dalam aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan objek wisata tersebut.

Di sisi lain, dari segi responsivitas publik, muncul berbagai tanggapan dari masyarakat. Sebagian kelompok masyarakat mempertanyakan prioritas penggunaan anggaran daerah untuk pembangunan monumen, terutama di tengah masih adanya kebutuhan dasar yang belum sepenuhnya terpenuhi, seperti fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam proses perumusan hingga pelaksanaan kebijakan, penting untuk memperhatikan partisipasi publik serta membangun komunikasi kebijakan yang transparan dan efektif. Dengan demikian, kebijakan yang diambil tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga memperoleh legitimasi dan dukungan dari masyarakat luas.

Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, terdapat sejumlah saran kebijakan dan rekomendasi yang dapat disampaikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo guna mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah untuk pengembangan sektor pariwisata:

Pertama, pemerintah daerah harus menyusun strategi pemasaran pariwisata yang lebih proaktif dan berbasis digital untuk mendorong pencapaian target kunjungan wisatawan sebanyak 100.000 orang setiap tahun yang belum sepenuhnya terpenuhi pada 2026. Alokasi anggaran promosi dan pemasaran pariwisata yang mencapai Rp 7 miliar perlu ditingkatkan dan dialokasikan untuk platform digital yang memiliki cakupan lebih luas.

Kedua, pemerintah daerah perlu menambah partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata demi memastikan distribusi manfaat ekonomi yang merata. Program pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah serta pelatihan pemandu wisata lokal harus diperkuat sebagai bagian dari strategi pariwisata yang lebih inklusif.

Ketiga, perlu ada peningkatan transparansi dan komunikasi kepada publik terkait rencana dan realisasi penggunaan anggaran daerah untuk mengatasi kekhawatiran masyarakat mengenai prioritas dalam penggunaan APBD. Hal ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diungkapkan oleh Halim (2023).

Keempat, pemerintah daerah harus menetapkan sistem evaluasi dan pemantauan yang lebih ketat untuk menghindari keterlambatan dalam penyelesaian proyek di masa depan. Pengembangan sistem pelaporan berbasis teknologi informasi bisa menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dalam pengawasan anggaran pembangunan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, pengeluaran dana daerah untuk pembangunan Monumen Reog Ponorogo menunjukkan kinerja yang cukup efektif dan efisien, terlihat dari tingkat pencapaian anggaran yang mencapai sekitar 97% dari total alokasi yang ada. Dalam hal alokasi, pemerintah daerah telah memberikan prioritas pada sektor pariwisata melalui pembangunan infrastruktur serta fasilitas pendukung sebagai langkah untuk memperkuat ikon wisata daerah. Dari sudut pandang efektivitas, dana yang digunakan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperkuat identitas budaya, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meskipun target jumlah pengunjung wisatawan masih belum tercapai secara maksimal. Di sisi lain, dari segi efisiensi, serapan

anggaran yang tinggi mengindikasikan pengelolaan yang baik, namun masih terdapat kesenjangan antara target dengan realisasi, terutama terkait penyebaran dampak ekonomi bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengeluaran dana daerah telah memberikan dampak positif bagi pengembangan pariwisata, namun perlu dilakukan optimalisasi lebih lanjut agar pencapaian yang diraih bisa lebih maksimal dan merata.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2021). Dasar dasar kebijakan publik. Alfabeta.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo. (2023). Kabupaten Ponorogo dalam angka 2023.

BPS Kabupaten Ponorogo.

Halim, A. (2023). Akuntansi keuangan daerah. Salemba Empat. Mahmudi. (2019). Manajemen kinerja sektor publik. UPP STIM YKPN. Mardiasmo. (2020). Akuntansi sektor publik. Andi.

Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (2019). *Public finance in theory and practice*. McGraw-Hill.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo. (2021). Rencana Pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Ponorogo 2021-2026. Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo. (2021). Laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo. Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Republik Indonesia. (2003). Undang Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Republik Indonesia. (2004). Undang Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.